



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

Nomor: 188.04/87.12/BAPPEDA-LITBANG/2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL

BUPATI BUOL,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUOL;**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Buol Tahun 2023- 2026;

KEDUA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Tengah dan Instansi Terkait:

KETIGA

: Inspektorat Kabupaten Buol wajib:

- a. melakukan revidu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja (LKj);
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 7 Februari 2023

Pj. BUPATI BUOL,

Drs. M. MUCHLIS, M.M

Lampiran : Keputusan Bupati Buol

Nomor : 188.04/87.12/BAPPEDA-LITBANG/2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2023-2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUOL**

I. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KAB. BUOL

No.	Sasaran	Indikator		Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1	2		3	4	5	6
1	Meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	1	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Unggulan / Jumlah PDRB x 100%	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perikanan, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		2	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Nilai hasil survey kepuasan layanan infrastruktur Pemerintah Daerah	Hasil Survey	Penanggungjawab: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

No.	Sasaran	Indikator	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IKLH = (IPAX30%) + (IPUX30%) + (ITHX40%) IPA = Indeks Kualitas Air IPU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	IKPLH	Penanggungjawab: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Lingkungan Hidup
		4	Indeks Risiko Bencana Indeks Resiko Bencana = Indeks Bahaya x Indeks Kerentanan / Indeks Kapasitas. Bahaya (dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunungapi, dan lainnya) x Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan / Komponen Capacity (kapasitas)	Dokumen Indeks Resiko Bencana	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Sasaran	Indikator		Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
2	Meningkatnya Lapangan Kerja dan Pemerataan Pendapatan untuk Keberdayaan Keluarga	5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah Penganggur terbuka usia angkatan kerja / jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6	Gini Ratio	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})$ dimana: <i>P_i</i> : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-<i>i</i> <i>Q_i</i> : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-<i>i</i> Nilai <i>gini ratio</i> berkisar antara 0 dan 1, jika: • $G < 0,3$ = ketimpangan rendah • $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang • $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Sosial
		7	Indeks Pemberdayaan Perempuan	Diukur berdasarkan 3 komponen yaitu: 1. Keterwakilan perempuan dalam parlemen 2. Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknis 3. Sumbangan/Distribusi pendapatan	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Sasaran	Indikator		Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Komoditas Pangan dan Non Pangan	8	Purchasing Power Parity (PPP)	PPP = Jumlah Penduduk Miskin dengan Pendapatan di bawah \$1 dibagi dengan Jumlah Penduduk dikali 100%	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		9	Indeks Pendidikan	Indeks Pendidikan = $\frac{\text{indeks harapan lama sekolah} + \text{indeks rata-rata lama sekolah}}{2}$	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		10	Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan = $\frac{\text{Angka Harapan Hidup (AHH)} - \text{Angka Harapan Hidup Minimal (AHH Min)}}{\text{Angka Harapan Hidup Maksimal (AHH Max)} - \text{Angka Harapan Hidup Minimal (AHH Min)}}$	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya	11	Indeks Kegotong Royongan	Parameter/mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, kegiatan bakti sosial dan jejaring sosial	Perangkat Daerah Terkait	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Sasaran	Indikator		Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	IPK = Nilai Rata-rata dari Nilai Dimensi: Ekonomi Budaya; Pendidikan; Ketahanan Sosial Budaya; Warisan Budaya; Ekspresi Budaya; Budaya Literasi dan Gender	Dokumen Indeks Pembangunan Kebudayaan	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan sampai Desa	13	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Kemenpan-RB	Penanggungjawab: Asisten Administrasi Umum Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Inspektorat, Bappeda-Litbang dan Bagian Organisasi, BKPSDM
		14	Indeks Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi RB oleh Kemenpan-RB	Penanggungjawab: Asisten Administrasi Umum Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Inspektorat, Bappeda-Litbang dan Bagian Organisasi, BKPSDM
		15	LPPD	Penilaian LPPD yang di keluarkan oleh Kemeterian Dalam Negeri terhadap Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Hasil Evaluasi LPPD oleh Kemendagri	Penanggungjawab: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Bagian Pemerintahan

No.	Sasaran	Indikator		Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
		16	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Evaluasi Kemen PAN RB tentang Inovasi Daerah	Hasil Evaluasi Inovasi Daerah oleh Kemen PAN RB/Kemendagri	Penanggungjawab: Asisten Administrasi Umum Koordinator: Bappeda-Litbang Perangkat Daerah Penyedia Data dan Pelaksana Program: Bappeda-Litbang

II. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUOL

NO.	SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6
1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN					
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan		Indeks Pendidikan	Indeks pendidikan= (<i>indeks harapan lama sekolah + indeks rata-rata lama sekolah</i>)/2	BPS dan Perangkat Daerah Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Stabilitas Sosial Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya		Indeks Pembangunan Kebudayaan	IPK = Nilai Rata-rata dari Nilai Dimensi: Ekonomi Budaya; Pendidikan; Ketahanan Sosial Budaya; Warisan Budaya; Ekspresi Budaya; Budaya Literasi dan Gender	BPS dan Perangkat Daerah Terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB					
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan		Indeks Pembangunan kesehatan masyarakat	Jumlah rata-rata dari 24 indikator Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah terkait Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
			Standar pelayanan minimal bidang kesehatan	Jumlah rata-rata dari 12 indikator SPM bidang Kesehatan	Dokumen SPM Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

	Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan		Laju Pertumbuhan Penduduk	$r = \{(Pt/Po) \times (1/t) - 1\} \times 100$ $r = \text{laju pertumbuhan penduduk}$ $Pt = \text{jumlah penduduk pada tahun } t$ $Po = \text{jumlah penduduk pada tahun dasar}$ $t = \text{selisih tahun } Pt \text{ dengan } Po$ $Pt = Po + (B - D) + (Mi - Mo)$ $Pt = \text{jumlah penduduk pada tahun ke } t$ $Po = \text{jumlah penduduk pada tahun dasar (o)}$ $B (\text{birth}) = \text{jumlah kelahiran selama periode } o - t$ $D (\text{death}) = \text{jumlah kematian selama periode } o - t$ $Mo = \text{jumlah migrasi keluar selama periode } o - t$ $Mi = \text{jumlah migrasi masuk selama periode } o - t$	Perangkat Daerah terkait	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
	Meningkatnya Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum		Cakupan layanan infrastruktur bidang pekerjaan umum	Jumlah layanan infrastruktur bidang pekerjaan umum yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan infrastruktur x 100%	Data Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya akses pelayanan dasar masyarakat		Cakupan layanan penduduk berakses air minum layak dan aman	Jumlah layanan penduduk berakses air minum layak dan aman yang tertangani dibagi jumlah penduduk x 100%	Data Akses Air Bersih	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. DINAS PERHUBUNGAN						
	Meningkatnya Pelayanan Keselamatan dan fasilitas sarana Prasarana Transportasi		Indeks Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dibagi Jumlah Penduduk x 100.000	Data Kecelakaan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan

5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau		Rasio Rumah layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni di bagi Jumlah Penduduk	Data Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Rasio Permukiman Layak Huni	Luas Permukiman Layak Huni dibagi Luas Wilayah Permukiman	Data Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman Yang Didukung Dengan PSU	Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu x 100%	Data Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Meningkatnya Penyelesaian Permasalahan Pertanahan		Penyelesaian Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah Penyelesaian Ganti Rugi Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Data Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						
	Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Daerah		Persentase Penegakan PERDA	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	Bidang Penegakan PERDA	KASAT POL PP
			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	$\frac{\text{Jangkauan Luas wilayah Manajemen kebakran}}{\text{Luas wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Kebakaran	KASAT POL PP

7. DINAS SOSIAL					
	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi PPKS dan PSKS		Persentase (%) Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mapan	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mapan : Jumlah Total Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) x 100 %	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
	Meningkatnya peran aktif masyarakat dalam melaksanakan pelayanan sosial bagi PPKS/Masyarakat Miskin		Persentase peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PPKS	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penanganan PPKS : Jumlah Total Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) x 100%	Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
8. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					
	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja		Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Ketenagakerjaan yang produktif	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat ketenagakerjaan yang produktif dibagi jumlah pencari kerja x 100%	Data Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Pencari Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dibagi jumlah pencari kerja x 100%	Data Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja		Persentase Tenaga Kerja Yang Terdaftar Sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	Jumlah tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan dibagi jumlah tenaga kerja x 100 %	Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi jumlah kasus perselisihan hubungan industrial x 100 %	Data Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya Kesempatan dan Kesiapan Calon Transmigrasi		Persentase Calon Transmigran Yang Berhasil dan Mampu Hidup Mandiri	Jumlah calon transmigran yang berhasil dan mampu hidup mandiri dibagi jumlah calon transmigran x 100 %	Data transmigrasi	
9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP						
	Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha /Kegiatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pelaku Usaha (Kegiatan) yang taat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup / Jumlah Pelaku Usaha (Kegiatan) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup x 100%	Perangkat Daerah Terkait	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya Fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	1	Rasio Ruang Terbuka Hijau	Rasio Ruang Terbuka Hijau = Luas Ruang Terbuka Hijau/Luas Wilayah ber HPL/HGB x 100%	Perangkat Daerah Terkait	

	Meningkatnya Upaya Kerja Sama yang Efektif dan Efisien dengan Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional	1	Jumlah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diakui	Jumlah Masyarakat Hukum Adat dan Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional yang diakui oleh Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah Terkait	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	1	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani = Jumlah Sampah yang tertangani (ton) / Total Jumlah Timbulan Sampah di Kab (Ton) x 100%	Perangkat Daerah Terkait	
10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
	Meningkatnya Pemanfaatan Database Kependudukan oleh Pihak yang Membutuhkan	1	Rasio Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah Dokumen Kepemilikan Kependudukan : Jumlah Keseluruhan Dokumen Kependudukan.	Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Persentase Penduduk Ber KTP	Jumlah Penduduk ber KTP : Jumlah Penduduk Wajib KTP x 100% .	Permendagri 86 tahun 2017 , Bidang Pendaftaran Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Jumlah Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan tersedia : Total Data dan Inovasi Pelayanan x 100%.	Bidang Pemanfaatan Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3	Persentase Anak Ber Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk Lahir dan Memperoleh Akta Kelahiran di Tahun Bersangkutan : Jumlah Kelahiran di Tahun Bersangkutan x 100% .	Bidang Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

		4	Persentase Kepemilikan Pasangan Ber Akta Nikah	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah : Jumlah Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah x 100%.	Bidang Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		5	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Jumlah Kartu Keluarga Yang Diterbitkan : Jumlah Kepala Keluarga x 100% .	Bidang Pendaftaran Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) : Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) x 100%.	Bidang Pendaftaran Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Persentase Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan : Jumlah Kematian x 100%.	Bidang Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak Untuk membentuk	1	Persentase Penyelesaian Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang terselesaikan : Jumlah Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Diterima x 100%	Bidang P3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		2	Partisipasi angkatan Kerja Perempuan	Jumlah Perempuan Yang Bekerja : Jumlah Angkatan Kerja Perempuan x 100%	Bidang P3A	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Ekonomi Perdesaan	1	Persentase Penurunan Desa Tertinggal	Jumlah Desa Tertinggal : Jumlah Desa Keseluruhan x 100%	Bidang Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

		2	Jumlah Badan Usaha Milik Desa yang terbina	Jumlah Bumdes dan Bumdesma	Bidang Pemberdayaan Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
12. DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						
	Berkembangnya pertumbuhan UKM dan koperasi yang mandiri	1	Persentase koperasi aktif	Persentase koperasi aktif = Jumlah koperasi aktif/ Jumlah seluruh koperasi x 100	Perangkat Daerah Terkait	DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	Persentase Usaha Mikro dan Kecil = Jumlah usaha mikro dan kecil /Jumlah seluruh UKM x 100 %	Perangkat Daerah Terkait	
		3	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	Persentase UKM non BPR/LKM aktif = Jumlah UKM non BPR/LKM aktif / Jumlah seluruh UKM non BPR/LKM x 100%	Perangkat Daerah Terkait	
		4	Persentase BPR/LKM aktif	Persentase BPR/LKM aktif = Jumlah BPR/LKM aktif / Jumlah seluruh BPR/LKM aktif x 100%	Perangkat Daerah Terkait	
	Berkembangnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Perdagangan	1	Ekspor Bersih Perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan = Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	Perangkat Daerah Terkait	
		2	Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha Informal	Cakupan Bina kelompok pedagang/Usaha InformalJumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n / Jumlah kelompok pedagang/usaha informal x 100%	Perangkat Daerah Terkait	
		3	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin = Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda Tahun n / Jumlah kelompok pengrajin	Perangkat Daerah Terkait	

13. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
	Meningkatnya Investasi Berskala Nasional PMA / PMDN	1	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN dan PMA	Perangkat Daerah Terkait	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik	2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = Total dari Nilai Persepsi Per Unsur / Total Unsur Yang Terisi x Nilai Penimbang	Perangkat Daerah Terkait	
14. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						
	Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Meningkatnya PDRB Sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Sektor Pariwisata dibagi keseluruhan jumlah PDRB X 100 %	BPS dan data PDRB sektor pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Prestasi Kelompok Pemuda Produktif dan Prestasi Olahraga		Persentase Kelompok Pemuda Produktif	jumlah kelompok pemuda produktif dibagi jumlah kelompok pemuda X 100 %	Data kepemudaan dan olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Prestasi Bidang Olahraga	Jumlah Cabang Berprestasi dibagi dengan Jumlah cabang olahraga yang di ikuti X 100%	Data kepemudaan dan olahraga	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
15. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						
	Terwujudnya Perpustakaan Sesuai Standar Nasional dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah Komponen Pembentuk Indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat : Aspek Masyarakat (Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan x 100.	Bidang Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

	Menjamin Keselamatan dan Keamanan Arsip Sebagai Bukti Pertanggungjawaban dalam Kehidupan Bermasyarakat, Bernegara dan Berbangsa		Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku : Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Bidang Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16. DINAS PERIKANAN						
	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan	1	Nilai Tukar Nelayan	Nilai Tukar Nelayan = Indeks yang diterima Nelayan/Indeks yang dibayar Nelayan x 100	BPS dan Perangkat Daerah Terkait	DINAS PERIKANAN
	Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan	1	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total luas Perairan Teritorial	Rasio Kawasan Lindung Perairan Terhadap Total luas Perairan Teritorial = Kawasan Lindung Perairan/Total Luas Perairan Teritorial	Perangkat Daerah Terkait	
	Meningkatnya Produksi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang berdaya Saing	1	Produksi Perikanan	Produksi Perikanan = Jumlah Produksi Perikanan yang dikonversi dalam satuan Ton	Perangkat Daerah Terkait	
		2	Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan = Besaran tingkat konsumsi ikan yang dikonversi dalam satuan Kg/Kapita/Tahun	Perangkat Daerah Terkait	
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Terkait SDKP	1	Jumlah Hari Operasi Pengawasan SDKP	Jumlah Hari Operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP)	Perangkat Daerah Terkait	

17. DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						
	Menjamin Tersedianya Pangan yang Aman dan Berkualitas	1	Neraca Bahan Makanan	Neraca Bahan Makanan (NBM) = P - S + I - E yang dikonversi dalam satuan Kkal/Kapita/Hari dimana P = Produksi Bahan Makanan didalam Kabupaten, S = Perubahan Stock (Selisih antara Stock Akhir dengan Stock Awal), I = Bahan makanan yang diimpor atau masuk Kabupaten, E = Bahan Makanan yang diekspor atau keluar Kabupaten	Perangkat Daerah Terkait	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Meningkatnya Produksi dan Produktifitas Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	1	Produksi Sektor Pertanian	Produksi Sektor Pertanian = Jumlah Produksi Komoditas Pertanian yang dikonversi dalam satuan Ton	Perangkat Daerah Terkait	
		2	Produksi Sektor Perkebunan	Produksi Sektor Perkebunan = Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan yang dikonversi dalam satuan Ton	Perangkat Daerah Terkait	
		3	Produksi Sektor Peternakan	Produksi Sektor Peternakan = Jumlah Produksi Komoditas Peternakan yang dikonversi dalam satuan Kilogram	Perangkat Daerah Terkait	
18. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Beroreintasi pada Layanan informatika Sampai Desa	1	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE	Hasil Penilaian SPBE Kemenpan-RB	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
		2	Cakupan layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian kabupaten	Jumlah layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian kabupaten yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh layanan komunikasi, informatika, statistik dan persandian kabupaten x 100%	Data komunikasi, informatika, statistik dan persandian kabupaten	

19. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase Keselarasan Program Pembangunan Dalam RPKD Terhadap RPD	Jumlah Program dalam RPKD / Jumlah Program dalam Rencana Pembangunan Daerah x 100 %	Data jumlah program dalam dokumen perencanaan	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Implementatif	1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan = Jumlah Kelitbangan dalam RPKD / Jumlah Kelitbangan dalam RPJMD x 100%	Data Kelitbangan	
20. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM						
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan Aparatur yang adaptif, responsif, peduli dan melayani	1	Jumlah Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan pimpinan tinggi	Data Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
		2	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	Jumlah Jabatan Administrasi	Data Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
		3	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	Data Manajemen Kepegawaian	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM

	Peningkatan Manajemen ASN	1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural dibagi jumlah total jabatan x 100%	Data Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
		2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dibagi jumlah total ASN x 100%	Data Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
	Tersedianya ASN berkualitas dalam rangka pengendalian dan distribusi ASN	1	Rata-rata pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah total pegawai	Data Pengembangan SDM	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM
21. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						
	Mencapai Kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Setiap Tahun	1	Nilai Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil Opini BPK	Perangkat Daerah Terkait	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel	2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Perangkat Daerah Terkait	
22. BADAN PENDAPATAN DAERAH						
	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan = $\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$	Data PAD	BADAN PENDAPATAN DAERAH

23. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						
	Meningkatnya Penanganan dan Mitigasi Kebencanaan Daerah		Persentase wilayah bencana yang tertangani	Jumlah wilayah bencana yang tertangani dibagi jumlah bencana yang terjadi x 100%	Data Penanganan dan Mitigasi Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
	Terlaksananya keamanan dan kenyamanan dilingkungan masyarakat	1	Persentase Generasi Muda yang diberikan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Generasi Muda Yang Diberikan Pemahaman dibagi Jumlah Generasi Muda Yang Telah Diberikan Pemahaman dikali 100%	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama	KEPALA BADAN
		2	Persentase Ormas yang terdaftar pada Pemerintah di Wilayah Kabupaten Buol	Jumlah Organisasi Masyarakat dibagi Jumlah Organisasi Masyarakat yang terdaftar dikali 100%	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	KEPALA BADAN
25. INSPEKTORAT DAERAH						
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Jumlah Temuan Yang ditindaklanjuti dibagi Jumlah Temuan x 100%	Subkoordinator Analisis Pelaporan, Evaluasi dan Tindak Lanjut	INSPEKTUR DAERAH
		2	Persentase penanganan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan Yang Ditangani dibagi Jumlah Pengaduan x 100%	Inspektur Pembantu V	INSPEKTUR DAERAH
		3	Level Kapabilitas APIP	Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat	Sekretaris	INSPEKTUR DAERAH

26. SEKRETARIAT DAERAH						
	Meningkatnya kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesra	1	Persentase kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang di tindaklanjuti	Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti dibagi dengan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Kesra yang di Rencanakan dikali 100%	Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Sekretaris Daerah
	Meningkatnya kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan	1	Persentase kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti	Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang di tindaklanjuti dibagi dengan Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang direncanakan dikali 100%	Asisten Perekonomian dan pembangunan	Sekretaris Daerah
	Meningkatnya kebijakan di bidang Administrasi Umum	1	Persentase kebijakan di Bidang Administrasi Umum yang di tindaklanjuti	Kebijakan di Bidang Administrasi Umum yang Ditindaklanjuti dibagi dengan Kebijakan di Bidang Administrasi Umum yang Direncanakan dikali 100%	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris Daerah
27. SEKRETARIAT DPRD						
	Terwujudnya Fasilitas Pembahasan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Buol		Presentase Tersusunnya Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Buol	Jumlah produk hukum yang tersusun dibagi Jumlah Produk Hukum yang direncanakan dikali 100%	Data Bagian Hukum dan Persidangan	Sekretaris Dewan
	Meningkatnya fasilitas dan pengawasan, penganggaran dan aspirasi		Persentase terlaksananya fasilitas dan pengawasan, penganggaran dan aspirasi	Jumlah Fasilitas, Pengawasan, Penganggaran Dan Aspirasi Yang Dilaksanakan/Jumlah Fasilitas, Pengawasan, Penganggaran Dan Aspirasi Yang Direncanakan x 100%	Data Bagian Fasilitas dan Pengawasan	

	Meningkatnya pelayanan administrasi kesekretariatan		Persentase terlaksananya pelayanan administrasi kesekretariatan	Jumlah Kegiatan Adm Kesekretariatan Yang Dilaksanakan/Jumlah Kesekretariatan Yang Direncanakan X 100%	Yang Adm	Data Bagian Umum	
--	---	--	---	---	----------	------------------	--

Pj. BUPATI BUOL,



Drs. M. MUCHLIS, M.M